

BAB V

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pada masa Orde Baru pemerintah melakukan depolitisasi terhadap kalangan Islam, terutama terhadap kalangan Islam yang dianggap sebagai “ekstrem kanan”. Menurut pemerintah, kalangan ini pernah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pada peristiwa PRRI-Permesta maupun DI/TII.

Kalangan Islam tersebut berupaya untuk kembali mengambil peranan dalam pemerintahan, karena Orde Baru yang menggantikan Demokrasi Terpimpin membawa harapan akan kembalinya kalangan Islam dalam panggung politik. Akan tetapi, harapan tersebut tidak pernah terealisasikan dalam Orde Baru. Orde Baru melakukan upaya depolitisasi yang jauh lebih luas dibandingkan masa sebelumnya. Kebijakan depolitisasi memberikan ruang gerak terbatas bagi umat Islam, yaitu pada bidang dakwah. Sedangkan pemerintah berusaha membatasi peranan kalangan Islam dalam bidang politik. Hanya kalangan yang dianggap moderat dan dapat bekerjasama dengan pemerintah mendapatkan ruang yang lebih leluasa. Keadaan ini membuat secara kuantitas pemeluk Islam semakin meningkat.

Kebijakan depolitisasi yang diterapkan oleh Orde Baru membuat kalangan Islam yang dikategorikan sebagai “ekstrem kanan” menempuh jalur dakwah untuk tetap mengambil peranan dalam masa tersebut. Kalangan “ekstrem kanan” yang mayoritas merupakan tokoh-tokoh ex-Masyumi bermusyawarah dan menghasilkan kesepakatan membuat sebuah lembaga bernama Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) dalam acara silaturahmi ulama se-Jakarta di Masjid Al-Munawarah, Tanah Abang pada 26 Februari 1967.

DDII dibentuk sebagai lembaga yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dakwah tersebut. Para ulama yang hadir dalam pembentukan DDII berpendapat penyampaian dakwah saat itu masih banyak kekurangan, sehingga perlu diadakan perbaikan dari penyempurnaan sistem, peralatan, serta peningkatan teknik komunikasi. Oleh karena alasan tersebut dibentuklah DDII sebagai lembaga konsultasi peningkatan dakwah.

Meskipun DDII memfokuskan kegiatannya pada bidang dakwah, tetapi DDII juga memberikan perhatian terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru. Hal ini terlihat dalam penerbitan buku-buku PMP untuk tingkat SD, SLP, dan SLA. Buku-buku tersebut dianggap bertentangan dengan akidah Islam, sehingga DDII meminta pemerintah untuk merevisinya.

Penerbitan buku-buku PMP untuk tingkat SD, SLP, dan SLA berdasarkan pada Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang P4 dan Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978 tentang GBHN. Penerbitan buku-buku PMP dimaksudkan sebagai penyeragaman ideologi, yakni ideologi Pancasila bagi seluruh warga negara.

Akan tetapi, buku-buku PMP yang dianggap baik dalam penyusunannya mendapatkan protes dari DDII khususnya, maupun kalangan Islam secara umumnya. Menurut DDII, dalam buku-buku tersebut terdapat upaya-upaya pendangkalan akidah. DDII meminta kepada pemerintah agar buku-buku tersebut direvisi karena terdapat hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti kalimat yang menyatakan bahwa semua agama itu sama.

DDII melakukan upaya-upaya agar pemerintah merevisi buku yang meresahkan masyarakat. DDII meminta agar revisi dilakukan secara menyeluruh dan mendasar, tidak hanya perbaikan secara teknis. Pelajaran tersebut juga tidak dinamakan Pendidikan Moral Pancasila, karena kata moral erat kaitannya dengan agama masing-masing. Sebaiknya pelajaran tersebut dikembalikan ke nama semula, yakni *civics* (kewarganegaraan).

Departemen Agama memberikan tanggapan atas sikap DDII melakukan penolakan atas buku-buku PMP. Departemen Agama melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Pendidikan Agama mengadakan penelitian terhadap buku-buku PMP yang meresahkan tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam buku-buku tersebut terdapat pelajaran yang penting bagi siswa-siswa. Akan tetapi, ada bagian-bagian dari buku PMP yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, Departemen Agama meminta agar buku tersebut direvisi.

Pada 22 Januari 1982, Presiden Soeharto memerintahkan kepada BP7 untuk memperbaiki buku-buku PMP. Tim mengatakan bahwa ada bagian-bagian yang menyatakan agama ditonjol-tonjolkan.

Pada 3 Agustus 1983, menandai penggantian buku-buku PMP lama dengan PMP edisi baru. Akan tetapi, perbaikan yang diharapkan oleh DDII tidak pernah terwujud. Perbaikan-perbaikan oleh tim yang ditunjuk oleh pemerintah hanya pada masalah redaksional. Bahkan, ada bagian yang dipermasalahkan dalam buku PMP oleh DDII tetapi tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh tim tersebut.

Setelah buku-buku PMP edisi baru diedarkan, Natsir sebagai tokoh DDII yang gigih memperjuangkan masalah ini meminta agar buku-buku PMP edisi baru ditarik. Natsir mempermasalahkan aliran kepercayaan dan masalah moral yang sebaiknya dibahas dalam pelajaran agama saja.

Meskipun protes dan penolakan terhadap isi buku-buku PMP tidak hanya datang dari DDII, namun pemerintah tetap mengedarkan buku-buku tersebut di sekolah-sekolah. Terlihat jelas ini merupakan usaha pemerintah untuk menyeragamkan ideologi, yakni Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat.